

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN (BOP) MENURUT JUKLAK BOP PKLK
TAHUN 2018 PADA SLB NEGERI 2 TANJUNGPINANG
DAN SLB MUTIARA**

SKRIPSI

Oleh

**WAN ULFA AGUSTINA
NIM : 15622196**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN (BOP) MENURUT JUKLAK BOP PKLK
TAHUN 2018 PADA SLB NEGERI 2 TANJUNGPINANG
DAN SLB MUTIARA**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh

**WAN ULFA AGUSTINA
NIM : 15622196**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN (BOP) MENURUT JUKLAK BOP PKLK
TAHUN 2018 PADA SLB NEGERI 2 TANJUNGPINANG
DAN SLB MUTIARA

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang

Oleh

Nama : WAN ULFA AGUSTINA

NIM : 15622196

Menyetujui:

Pembimbing Pertama



Bambang Sambodo, SE., M.Ak
NIDN. 8833900016/Asisten Ahli

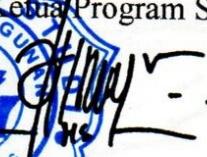
Pembimbing Kedua



Hasnarika, S.Si., M.Pd
NIDN. 1020118901/Asisten Ahli

Mengetahui,
Ketua Program Studi,




Hendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN. 1007036603/Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN (BOP) MENURUT JUKLAK BOP PKLK
TAHUN 2018 PADA SLB NEGERI 2 TANJUNGPINANG
DAN SLB MUTIARA**

Yang Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :

Nama : WAN ULFA AGUSTINA
NIM : 15622196

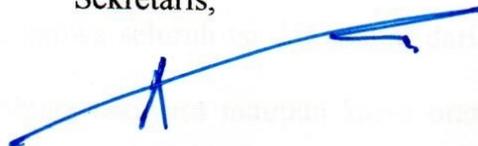
Telah Dipertahankan Didepan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Tiga Puluh
Agustus Dua Ribu Dua Puluh Satu Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,


Bambang Sambodo, S.E., M.Ak
NIDN. 8833900016/Asisten Ahli

Sekretaris,

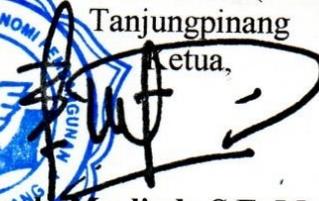

Andres P. Sitepu, S.E., M.Ak
NIDN. 8854290019/ Asisten Ahli

Anggota,


Marina Lidya, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1024037602/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 30 Agustus 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan



Tanjungpinang
Ketua,

Charly Marlinda, S.E., M.Ak.CA
NIDN. 1029127801/Lektor

PERNYATAAN

Nama : Wan Ulfa Agustina
NIM : 15622196
Tahun Angkatan : 2015
Indeks Prestasi Kumulatif :
Program Studi : S-1 Akutansi
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Pendidikan (BOP) Menurut Juklak BOP PKLK
Tahun 2018 Pada SLB Negeri 2 Tanjungpinang
Dan SLB Mutiara

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri danbuka rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 30 Agustus 2021

Penyusun,



WAN ULFA AGUSTINA

NIM: 15622196

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku, Ayah Wan Suhermansyah dan Bunda Dewi Widiastuty. Terimakasih atas segala sesuatunya yang selalu ayah dan bunda berikan selama ini. Terimakasih telah merawat dan membesarkan ku dengan penuh cinta kasih hingga saat ini. Terimakasih juga atas segala doa, dukungan, dan semangat yang tak henti – henti nya yang selalu ayah dan bunda berikan kepada kakak.
2. Adik – adikku, Wan Vellia Anggraini dan Wan Viona Angle. Terimakasih juga atas support yang tak putus kalian berikan dan doa yang tak pernah berhenti yang selalu menanyakan sejauh mana proses pengerjaan skripsi ini.
3. Kakek Usman Sulaiman, nenek (alm) Siti Maimunah, dan juga tante ku Eva Violita. Terimakasih juga sudah selalu memberikan ku support dan doa nya dalam proses pengerjaan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu dosen pembimbing satu dan dua yang telah membantu memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi saya ini.
5. Terimakasih untuk kekasih hati yang selalu menyemangati diri ini, Febrand Indrajid Valentine. Terimakasih tetap selalu menemani di setiap proses ku dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Untuk sahabat tersayang yang sudah banyak membantu Rahma Hardanti, Yodi Herlangga, Winda Zulfia, Melda Nor Welya, Fiky Pardila, Lola Vitta

Loka, Sadira Putri, Olivia Ayu Ningsih, Serin Audina, Henny Nur
Rismawati, Ade Tiara Regita, Beby Silvia Simamora, Retno Anggraini,
Akbar, dan teman – teman lainnya yang tak dapat disebutkan satu persatu

MOTTO

**... JANGANLAH KAMU BERDUKA CITA,
SESUNGGUHNYA ALLAH SELALU BERSAMA KITA ...**

(AT-TAUBAH : 40)

**BANTULAH TEMAN SEPERJUANGAN MU
MUDAHKANLAH JALANNYA
AGAR JALANMU JUGA DIMUDAHKAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Menurut Juklak BOP PKLK Tahun 2018 Pada SLB Negeri 2 Tanjungpinang Dan SLB Mutiara**”, guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini banyak mendapat dukungan dan bantuan baik secara moril maupun secara materi dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Charly Marlinda S.E.,M.,Ak.,Ak.,CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami,S.E.,M.Si.Ak..CA selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia,S.E.,Ak.M.Si.CA selaku Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas M.,M. selaku Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria,SE.,M.Ak selaku ketua program studi S-1 Akutansi.

6. Bapak Bambang Sambodo,SE.,M.Ak selaku dosen pembimbing I yang telah membantu membimbing sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik oleh penulis.
7. Ibu Hasnarika,S.Si.,M.Pd selaku dosen pembimbing II yang telah membantu membimbing sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik oleh penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen serta staf-staf di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah membantu dari segi informasi terhadap penulis.
9. Bapak Zulkifli,S.Pd selaku Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Tanjungpinang dan juga Bapak Herwi Sitompul,S.Pd.,M.Pd selaku bendahara SLB Negeri 2 Tanjungpinang yang telah bersedia memberikan informasi mengenai kondisi di SLB Negeri 2 Tanjungpinang.
10. Ibu Nofrita,S.Pd.,AUD selaku Kepala Sekolah SLB Mutiara dan juga Tri Hartanti,S.Pd selaku bendahara SLB Mutiara yang telah bersedia memberikan informasi mengenai kondisi di SLB Mutiara.
11. Untuk keluarga besar ku terima kasih atas bantuan do'a serta materi dan dukungan penyemangat sehingga skripsi dapat penulis selesaikan.
12. Tidak lupa terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu penulis untuk terus berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dorongan semangat yang dilontarkan menjadi pacuan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah membantu dalam penyelesaian usulan penelitian ini. Mudah – mudahan karya tulis ini berguna bagi kita semua khususnya bagi di bidang studi Akutansi Publik.

Tanjungpinang, September 2021
Penulis

Wan Ulfa Agustina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERNYATAAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN MOTTO

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR TABEL..... xiii

DAFTAR GAMBAR..... xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

ABSTRAK xvi

***ABSTRACT* xvii**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 13

1.3 Tujuan Penelitian 13

1.4 Batasan Masalah 13

1.5 Kegunaan Penelitian 14

1.5.1 Kegunaan Ilmiah 14

1.5.2 Kegunaan Praktis..... 14

1.6 Sistematika Penulisan 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori 17

2.1.1 Bantua Operasional Pendidikan (BOP) 17

2.1.1.1 Pengertian Bantuan Operasional

Pendidikan (BOP) 17

2.1.1.2 Tujuan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).....	19
2.1.1.3 Pemberi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	20
2.1.1.4 Persyaratan Calon Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	20
2.1.1.5 Rincian Jumlah Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	20
2.1.1.6 Tugas dan Tanggungjawaban Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	21
2.1.2 Pengelolaan Dana	24
2.1.2.1 Pengertian Pengelolaan Dana	24
2.1.3 Laporan Keuangan	25
2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan	25
2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan	27
2.1.3.3 Jenis – Jenis Laporan Keuangan	28
2.2 Kerangka Pemikiran	30
2.3 Penelitian Terdahulu	30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Jenis Data	36
3.2.1 Data Primer	36
3.2.2 Data Sekunder	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data	37
3.4 Definisi Operasional Variabel	38
3.5 Teknik Pengolahan Data	38
3.6 Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	42
----------------------------	----

4.1.1 Profil Sekolah SLB Negeri 2 Tanjungpinang	42
4.1.2 Profil Sekolah SLB Mutiara	44
4.1.3 Identitas Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Tanjungpinang	46
4.1.4 Identitas Kepala Sekolah Mutiara	47
4.1.5 Visi Sekolah SLB Negeri 2 Tanjungpinang	48
4.1.6 Visi Sekolah SLB Mutiara	48
4.1.7 Misi Sekolah SLB Negeri 2 Tanjungpinang	48
4.1.8 Misi Sekolah SLB Mutiara	49
4.1.9 Tujuan Sekolah SLB Negeri 2 Tanjungpinang dan SLB Mutiara	49
4.1.10 Tugas Pokok dan Fungsi SLB Negeri 2 Tanjungpinang dan SLB Mutiara	51
4.1.11 Struktur Organisasi SLB Negeri 2 Tanjungpinang	74
4.1.12 Struktur Organisasi SLB Mutiara	75
4.2 Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) menurut JUKLAK BOP PKLK Tahun 2018 Pada SLB Negeri 2 Tanjungpinang dan SLB Mutiara	76
4.2.1 Reduksi Data	76
4.2.2 Penyajian Data	88
4.2.3 Verifikasi Data atau Penarikan Kesimpulan	91
4.3 Pembahasan	95
4.3.1 Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) menurut JUKLAK BOP PKLK Tahun 2018 Pada SLB Negeri 2 Tanjungpinang dan SLB Mutiara	95
4.3.1.1 Organisasi Pelaksana	95
4.3.1.2 Tugas dan Tanggung jawab	95
4.3.1.3 Rencana Kegiatan	96
4.3.1.4 Pembelanjaan Dana	96
4.3.1.5 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	97
4.3.1.6 Ketentuan Perpajakan	97
4.3.1.7 Pelaporan	98

4.3.1.8 Pengawasan	98
4.3.1.9 Sanksi	98
4.3.1.10 Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) menurut JUKLAK BOP PKLK Tahun 2018 Pada SLB Negeri 2 Tanjungpinang dan SLB Mutiara.....	98

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	102
5.2 Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel.....	38
Tabel 3.2	Tabel Kesesuaian Petunjuk Teknsi	41
Tabel 4.1	Rekapitulasi Hasil Wawancara Tentang Organisasi Pelaksana	76
Tabel 4.2	Rekapitulasi Hasil Wawancara Tentang Organisasi Pelaksana	77
Tabel 4.3	Rekapitulasi Hasil Wawancara Tentang Tugas dan Tanggungjawab .	78
Tabel 4.4	Rekapitulasi Hasil Wawancara Tentang Tugas dan Tanggungjawab .	78
Tabel 4.5	Rekapitulasi Hasil Wawancara Tentang Tugas dan Tanggungjawab .	79
Tabel 4.6	Rekapitulasi Hasil Wawancara Tentang Tugas dan Tanggungjawab .	80
Tabel 4.7	Rekapitulasi Hasil Wawancara Tentang Rencana Kegiatan	81
Tabel 4.8	Rekapitulasi Hasil Wawancara Tentang Pembelanjaan Dana	82
Tabel 4.9	Rekapitulasi Hasil Wawancara Tentang Pembelanjaan Dana	82
Tabel 4.10	Rekapitulasi Hasil Wawancara Tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	83
Tabel 4.11	Rekapitulasi Hasil Wawancara Tentang Ketentuan Perpajakan	84
Tabel 4.12	Rekapitulasi Hasil Wawancara Tentang Pelaporan	85
Tabel 4.13	Rekapitulasi Hasil Wawancara Tentang Pelaporan	85
Tabel 4.14	Rekapitulasi Hasil Wawancara Tentang Pengawasan	86
Tabel 4.15	Rekapitulasi Hasil Wawancara Tentang Sanksi	87
Tabel 4.16	Hasil Penyajian Data	88
Tabel 4.17	Tabel Kesesuaian Petunjuk Teknis SLB Negeri 2 Tanjungpinang	100
Tabel 4.18	Tabel Kesesuaian Petunjuk Teknis SLB Mutiara	100

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1	Struktur Organisasi SLB Negeri 2 Tanjungpinang	74
Gambar 4.2	Struktur Organisasi SLB Mutiara	75

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Lembar Observasi
- Lampiran 3 : Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Selesai
- Lampiran 6 : *Turnity Checker*

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) MENURUT JUKLAK BOP PKLK TAHUN 2018 PADA SLB NEGERI 2 TANJUNGPINANG DAN SLB MUTIARA

Wan Ulfa Agustina.15622196.Akutansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang
Wanulfaagustina@gmail.com

Penelitian bertujuan menganalisis kesesuaian dana Bantuan Operasional Pendidikan di SLB Tanjungpinang menurut JUKLAK PKLK Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode kualitatif terdiri dari 4 orang yaitu 1 Kepala Sekolah, 1 Bendahara SLB Negeri 2 Tanjungpinang. 1 Kepala Sekolah, 1 Bendahara SLB Mutiara. Teknik yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan yang bertugas mengurus, mengelola penggunaan dana adalah kepala sekolah. Yang bertugas bertanggungjawab pengelolaan penggunaan dana adalah Kepala Sekolah. SLB Negeri 2 ada keterlibatan komite sekolah, SLB Mutiara tidak ada keterlibatan komite. Bentuk pertanggungjawabannya berupa bentuk laporan pertanggungjawaban yakni SPJ. Tugas pelaksanaan penggunaan dana dengan membelanjakan anggaran, membuat laporan pertanggungjawaban, menyampaikan laporan ke Dinas. Kendala dalam penyusunan dan pembuatan program rencana kegiatan sekolah masih terbatas. Kendala lainnya terlambatnya anggaran yang diterima sekolah dari pusat, tidak sesuai dengan jadwal juklak.

Rencana kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan. Kedua SLB dalam pembelanjaan dana sudah sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Penggunaan dana harus disiapkan adalah laporan ketika menerima anggaran dan laporan realisasi anggaran secara administrasi. Penerima bantuan wajib menyetor pajak. Untuk swasta tidak sama, tidak ada pembayaran pajak karena belanjanya tidak sampai untuk mengeluarkan pajak.

Kedua SLB melaporkan penggunaan dana ke Dinas disampaikan ke pusat, bentuk laporan jumlah dana diterima, dipergunakan, dan sisa dana yang ada. Yang bertugas mengawasi adalah Dinas Provinsi dan pusat. Bagi SLB sanksi yang diterima oleh sekolah apabila ada temuan dalam penyalahgunaan dana, pengurangan dana atau kuota terhadap sekolah, pemblokiran dana dan penghentian sementara dana bantuan.

Kata Kunci : Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Menurut Juklak BOP PKLK Tahun 2018

Dosen Pembimbing : 1. Bambang Sambodo,SE.,M.Ak
2. Hasnarika,S.Si.,M.Pd

ABSTRACT

OPERATIONAL RELIEF FUND MANAGEMENT ANALYSIS PENDAGE (BOP) ACCORDING TO JUKLAK BOP PKLK IN 2018 IN SLB NEGERI 2 TANJUNGPINANG AND SLB MUTIARA

Wan Ulfa Agustina.15622196.Accounting. STIE Pembangunan Tanjungpinang
Wanulfaagustina@gmail.com

Research aims to analyze the appropriational appropriations of operational relief funds. The company's decision to raise its interest rate is based on the company's decision. The methods used in research using qualitative methods consist from 4 people to 1 headmaster, 1 country's treasurer SLB Negeri 2 Tanjungpinang. 1 headmaster, 1 treasurer SLB Mutiara used was data reduction, data presentation, and deduction drawing.

Studies show that the head of the school is in charge of managing the use of funds. In charge of managing the funds is the head of the hedge. The board involved with the school's board of education, not the committee's involvement. The responsible os the accountability of the SPJ. Accomplishing the task of spending funds, making accounting reports, bringing reports to the ministry. The problem with the creation and construction of school plans is still limited. Another obstacle is the delay in the school's budgetary budget, not falling into place on tim's timetable.

The activity plan is as planned. Both SLB in funding purchases sholud meet the requirements. The use of funds should be prepared by a report to accept a budget and a administrative realization report. Taxpayer's grants. Private is not the same, there are no tax payments as his purchase is not to tax.

Both SLB's report on the use of funds to the ministry was relearn to the center, the report on the amount of money received, used, and the rest of the funds available. Supervised was the provincial and central services. Split that penalty accepted by the school if there's finds in dama abuse, reduction of funds or quotas to schools, blocking funds from temporary with drawal of aid.

Key Words : Education Operational Relief Fund Management (BOP) is Juklak BOP PKLK in 2018

**Supervisor : 1. Bambang Sambodo,SE.,M.Ak
2. Hasnarika,S.Si.,M.Pd**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu poin terutama untuk mewujudkan pembangunan untuk tiap wilayah, karena dengan terdapatnya pendidikan bisa melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu dan mempunyai donasi yang sangat besar terhadap kemajuan wilayah ataupun negeri. Sekolah selaku satuan lembaga pembelajaran, yang bertugas melakukan proses belajar mengajar didalamnya terdiri dari 3 bagian ialah: (1) *input*, ialah sesuatu kondisi yang dimana seseorang siswa belum mempunyai pengetahuan serta keahlian spesial, (2) transformasi, merupakan perihal terutama dalam suatu pembelajaran dimana dibagian ini terjalin sesuatu proses Aktivitas Belajar Mengajar (KBM), pada bagian ini tiap siswa hendak lewat proses pembinaan serta tutorial supaya mempunyai keahlian maupun pengetahuan spesial, serta (3) *output* yakni hasil dari proses yang di harapkan. Apabila proses KBM dapat terlaksana dengan sesuai rencana hingga menciptakan output yang bermutu, yakni tenaga kerja. Dalam Mengenai ini pemerintah memiliki kewajiban buat tingkatkan pembelajaran lewat kebijakan- kebijakan yang terbuat guna kenaikan kualitas pembelajaran. Rancangan visi serta misi wajib relevan disesuaikan dengan pertumbuhan masa yang terdapat dan dengan jenjangan ataupun tahapan pembelajaran resmi, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Akademi Besar (PT).

Pendidikan merupakan salah satu tolak ukur sesuatu pemerintahan yang lagi tumbuh, yang sanggup sediakan pertolongan keuangan melalui peningkatan

mutu pendidikan dapat menaikkan kualitas sumber tenaga manusia sesuatu negara. Di dunia Pendidikan, harusnya pemerintah mencermati faktor pendidikan antara lain ialah Partisipan didik, pendidik (Guru), fasilitas serta prasarana. Peninggalan yang diperlukan dalam pendidikan merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu. Sumber energi yang bermutu bisa diperoleh dari siswa, warga serta dari pendidik (Guru).

Salah satu guna dari pendidikan nasional adalah dalam rangka untuk meningkatkan keahlian dan juga untuk membentuk karakter serta peradaban bangsa yang memiliki martabat dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mempunyai tujuan supaya bisa meningkatkan kemampuan partisipan didik sehingga selaku manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan sebagai warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidian tidak cuma diperoleh lewat jalan resmi saja, ialah dengan Metode tiba, duduk, mendengar serta berikutnya hingga hendak mendapatkan penghargaan bersumber pada test yang sudah dilewati. Tetapi, pembelajaran dapat diperoleh memakai banyak sekali metode terlebih lagi memakai didukungnya media pendidikan yang serba sophisticated berusia ini. Pembelajaran nasional mempunyai visi "terbentuknya proses pembelajaran jadi pranata sosial yang bertenaga serta berwibawa buat memberdayakan segala rakyat negeri tumbuh selaku insan yang bermutu selaku dampaknya dapat serta kasar menanggapi tantangan era yang senantiasa berganti".

Tujuan sistem pendidikan nasional, manusia Indonesia dibutuhkan selaku orang yang mempunyai keahlian serta keahlian buat secara berdikari mempertinggi tingkatan biologi lahir batin, serta mempertinggi kiprahnya jadi individu, pegawai/ karyawan, rakyat warga, rakyat negeri, serta mahluk Tuhan. Pendekatan sistem merupakan suatu metode yang memandang pembelajaran secara merata serta sistemik, tidak parsial ataupun fragmentaris.

Proses Pendidikan ialah proses transformasi ataupun pergantian kemampuan konkret buat mempertinggi tingkatan hidup nyata lahir serta batin. Hasil pembelajaran ialah lulusan yang sudah terdidik bersumber pada/ mengacu pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sistem, secara simpel dapat didefinisikan jadi sesuatu kesatuan bagi aneka berbagai elemen ataupun bagian-bagian yang mempunyai interaksi fungsional serta berhubungan secara bergerak maju buat menggapai output yang diharapkan.

Pendidikan bisa diperoleh melalui beberapa alur yang berbeda yakni formal, non formal dan informal. Salah satu kiprah negara pada hal ini yakni memberikan atau meringankan dana pendidikan pada Indonesia. (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, 2013) menyebutkan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas dana investasi, dana operasi, dan dana personal.

Ketika salah satu anak dikatakan memiliki kebutuhan khusus, Pendidikan Luar Biasa sangat dibutuhkan. Sebab anak didik yang berkebutuhan khusus memiliki pendidikan spesifik tidak secara otomatis memerlukan pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa akan sinkron hanya bila kebutuhan anak didik tidak

bisa diakomodasi pada acara pendidikan umum. Dengan kata lain, pendidikan luar biasa merupakan kegiatan pembelajaran yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan khusus menurut individu anak didik. Mungkin mereka memerlukan penggunaan bahan-bahan, peralatan, layanan, dan/atau taktik mengajar yang spesifik.

Pendidikan buat Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) terselenggara pada Sekolah Luar Biasa (SLB) yang bertujuan agar dapat membantu ABK dalam berbagi ilmu pengetahuan, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Pasal 2, 1991) yaitu, Pendidikan Luar Biasa memiliki tujuan untuk dapat membantu siswa yang menderita kelainan fisik dan/atau mental supaya bisa berbagi sikap, pengetahuan dan keterampilan menjadi eksklusif juga anggota masyarakat pada mengadakan interaksi timbal-balik menggunakan lingkungan sosial, budaya dan alam lebih kurang dan bisa berbagi kemampuan pada global kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan. Tetapi kegiatan SLB yang mengacu kepada (Peraturan Pemerintah Nomor 72, 1991) mengalami kendala. Pendidikan bagi anak yang berkelainan diselenggarakan pada Sekolah Luar Biasa (SLB). Lokasi SLB pada biasanya berada pada Ibu Kota Kabupaten. Akibatnya sebagian anak-anak berkelainan, lantaran faktor ekonomi terpaksa tidak disekolahkan dengan kedua orang tuanya lantaran lokasi SLB jauh berdasarkan rumahnya, sedangkan Sekolah Dasar terdekat tidak bersedia mendapat lantaran tidak sanggup melayaninya. Selain hal tadi, kurang efektifnya manajemen pendidikan yang diterapkan pada SLB juga sangat mem-pengaruhi proses rendahnya mutu pendidikan ABK.

Pendidikan luar biasa tidak dibatasi dengan lokasi spesifik. Pemikiran terkini menyarankan bahwa layanan usahakan diberikan pada lingkungan yang

lebih alamiah dan normal yang sejalan dengan kebutuhan anak. Selain misalnya itu sanggup dilakukan pada bentuk acara layanan pada tempat tinggal bagi anak-anak berkebutuhan pendidikan spesifik prasekolah, kelas spesifik pada sekolah umum, atau sekolah spesifik buat murid-murid yang mempunyai keberbakatan. Pendidikan luar biasa diberikan pada kelas-kelas pendidikan umum.

Hak untuk mendapatkan pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tertera dalam (Undang - Undang Nomor 20 pasal 5 ayat 2 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, 2003) berbunyi: Warga Negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan anak – anak yang memiliki keunikan tersendiri dari jenis karakteristiknya, yang membuat mereka berbeda dengan anak-anak normal lainnya. Adanya undang-undang dan regulasi yang mengatur mengenai Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) pada Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah suatu tindakan yang sangat tepat, karena kita tentu tidak akan mampu memprediksikan apakah terdapat atau tidak nya anak-anak berkebutuhan spesifik dimasa depan, jibila dipandang berdasarkan beberapa tahun belakang, eksistensi anak-anak ABK selalu terdapat pada tiap-tiap daerah.

Setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental, yang bisa mengganggu atau adalah rintangan dan kendala baginya dalam melakukan secara selayaknya. Ada beberapa jenis orang yang memilik kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai pengertian masing-

masing yang mana kesemuanya memerlukan dukungan buat tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas :

1. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari:

a. Mental Tinggi

Kerap diketahui dengan orang berbakat intelektual, di mana tidak hanya mempunyai keahlian intelektual di atas rata-rata ia pula mempunyai kreativitas serta tanggungjawab terhadap tugas.

b. Mental Rendah

Keahlian mental rendah ataupun kapasitas intelektual/ Intelligence Quotient (IQ) (*Intelligence Quotient*) di dasar rata-rata bisa dipecah jadi 2 kelompok ialah anak lamban belajar(*slow learners*) ialah anak yang mempunyai *Intelligence Quotient* (IQ) antara 70- 90. Sebaliknya anak yang mempunyai *Intelligence Quotient* (IQ) di dasar 70 diketahui dengan anak berkebutuhan spesial.

c. Berkesulitan Belajar Spesifik

Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar(*achievement*) yang diperoleh.

2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi sebagian berbagai, ialah:

a. Kelainan Badan(Tuna Daksa)

Tunadaksa merupakan orang yang mempunyai kendala gerak yang diakibatkan oleh kelainan neuro- muskular serta struktur tulang yang bertabiat bawaan, sakit ataupun akibat musibah(kehabisan organ badan), polio serta lumpuh.

b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra)

Tuna netra merupakan orang yang mempunyai hambatan dalam penglihatan. Tuna netra bisa dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu: buta total (*blind*) serta low vision.

c. Kelainan Pendengaran (Tunarungu)

Tunarungu merupakan orang yang mempunyai hambatan dalam rungu baik permanen ataupun tidak permanen. Sebab mempunyai hambatan dalam rungu orang tunarungu mempunyai hambatan dalam berdialog sehingga mereka biasa diucap tunawicara.

d. Kelainan Bicara (Tunawicara)

Tunawicara merupakan seorang yang hadapi kesusahan dalam mengatakan benak lewat bahasa verbal, sehingga susah apalagi tidak bisa dipahami oleh orang lain. Kelainan bicara ini bisa dipahami oleh orang lain. Kelainan bicara ini bisa bertabiat fungsional di mana mungkin diakibatkan sebab ketunarunguan, serta organik yang memanglah diakibatkan terdapatnya ketidaksempurnaan organ bicara ataupun terdapatnya kendala pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

3. Tuna ganda (disabilitas ganda)

Pengidap cacat lebih dari satu kecacatan (ialah cacat raga serta mental). Bayaran pembelajaran ialah salah satu aspek berarti dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Bayaran pembelajaran inilah yang hendak digunakan buat membiayai segala pembiayaan pembelajaran. Kasus utama yang terdapat didalam pembiayaan pembelajaran ialah salah satunya merupakan gimana metode buat

memadai kebutuhan investasi, operasional serta personal sekolah dan gimana metode buat melindungi warga, spesialnya untuk mereka yang tidak sanggup memperjuangkan haknya buat mengenyam pembelajaran secara layak, baik di tingkatan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Awal Luar Biasa (SMPLB) serta Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Pembiayaan pendidikan adalah komponen yang esensial dan tidak bisa terpisahkan pada proses pelaksanaan belajar-mengajar. Dalam rangka pembentukan potensi sumber daya manusia (SDM), penggunaan aturan pendidikan yang efektif dan efisien diperlukan bisa membentuk SDM yang sempurna guna dan berhasil guna. Salah satu kunci keberhasilan pada pembangunan pendidikan, terletak dalam kemampuan SDM pada mengelola dana yang tersedia menggunakan mengacu dalam kebutuhan utama dan skala prioritas acara pembangunan pendidikan berdasarkan tahun ke tahun secara sedikit demi sedikit sinkron menggunakan perencanaan acara.

Dalam hal tersebut, pemerintah mempunyai upaya buat mengatasinya, menggunakan cara menaruh dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada sekolah-sekolah yang terdaftar. BOP mempunyai target yakni semua siswa dalam taraf pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) adalah acara pemerintah yang dipakai buat penyediaan pendanaan dana operasi non personalia. Dikarenakan sifatnya bantuan, pihak sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) melibatkan partisipasi warga buat memenuhi kebutuhan operasional lainnya.

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) merupakan bantuan bersumber daripada Pemerintah Pusat pada sekolah-sekolah dari jumlah anak didik yg terdapat pada sekolah tersebut. BOP diberikan pada sekolah buat dikelola sesuai menggunakan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya BOP dipakai pada pembiayaan yang mencakup porto penyediaan wahana dan prasarana, pengembangan asal daya manusia, dan kapital kerja permanen.

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) adalah kegiatan bantuan Pemda buat meringankan beban orang tua terhadap pendidikan anaknya. BOP ini diberikan ke sekolah-sekolah berdasarkan sekolah taraf dasar (Sekolah Dasar dan SMP) juga taraf menengah (SMA/SMK). Pemda baik pada taraf Propinsi juga Kabupaten/Kota wajib permanen menyediakan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) setiap tahun menjadi asal primer pembiayaan sekolah yang dianggarkan melalui APBD setempat.

Selain itu Pemda wajib memperhatikan mengenai kebutuhan dana BOP. Termasuk kepekaan pemerintah wilayah pada memastikan dana BOP berjalan sinkron menggunakan pedoman yg sudah ditetapkan oleh pemerintah. Disamping adanya tanggungjawab pemerintah buat menindaklanjuti apabila terdapat tanda defleksi yang asal berdasarkan laporan masyarakat.

Pendidikan adalah kebutuhan dasar setiap individu buat mengklaim keberlangsungan hidup setiap individu agar lebih bermartabat. Karena itu negara mempunyai kewajiban buat memberikan pelayanan pendidikan yg bermutu pada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang mempunyai perbedaan pada kemampuan (*difabel*) seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 31, tetapi

sayangnya sistem pendidikan pada Indonesia belum mengakomodasi keberagaman, sebagai akibatnya menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar dalam perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik juga mental yang dimiliki oleh anak didik. Jelas segmentasi lembaga pendidikan ini sudah merusak para anak didik buat bisa belajar menghormati realitas keberagaman pada masyarakat.

Hak untuk mendapatkan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus tertera dalam (Undang - Undang Nomor 20 pasal 5 ayat 2 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, 2003) berbunyi: Warga Negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. (Siswoyo, 2012) menyatakan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang luar biasa yang memiliki perbedaan dalam perkembangan fisik, mental ataupun sosial dari perkembangan gerak anak – anak normal pada umumnya. Sehingga dengan keadaan seperti itu memerlukan adanya bantuan khusus dalam usahanya dan juga untuk mencapai tahap perkembangan gerak yang maksimal.

Adanya undang-undang dan regulasi yang mengatur mengenai Anak Berkebutuhan Khusus pada Sekolah Analisis Manajemen Pendidikan pada SLB Negeri 1 Lima Kaum 73 Luar Biasa (SLB) adalah suatu tindakan yang sangat tepat, karena kita tentu tidak akan mampu memprediksikan apakah terdapat atau tidaknya anak-anak ABK dimasa depan, kalau ditinjau dari beberapa tahun belakang, eksistensi anak-anak ABK selalu terdapat pada tiap-tiap daerah. Pendidikan adalah kebutuhan dasar setiap individu buat mengklaim

keberlangsungan hidup individu supaya lebih bermartabat. Lantaran itu negara mempunyai kewajiban buat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu pada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang mempunyai perbedaan pada kemampuan (*difabel*) seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 31, tetapi sayangnya sistem pendidikan pada Indonesia belum mengakomodasi keberagaman, sebagai akibatnya menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar dalam perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik juga mental yang dimiliki oleh anak didik. Jelas segmentasi lembaga pendidikan ini sudah Mengganggu para anak didik buat bisa belajar menghormati realitas keberagaman pada masyarakat.

Pemanfaatan dana BOP ditujukan untuk mendukung operasional penyelenggaraan SLB dan digunakan secara efektif dan efisien. Biaya Operasional adalah biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung. Pertanggungjawaban keuangan dana BOP SLB di Provinsi Kepulauan Riau di percayakan dapat di laksanakan dengan tertib administrasi, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan.

Pelaksanaan BOP akan menjadi efektif apabila pihak penerima dana BOP melaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis seperti ketepatan waktu penerimaan oleh pihak sekolah sehingga dapat dimanfaatkan. Selain itu, keberpihakan pemerintah bagi siswa yang kurang mampu akan menjadi efektif dan efisien apabila pihak sekolah melaksanakan program tersebut. Pengelolaan dana dan semua sumberdaya yang ada dalam program BOP PKLK (Pendidikan Khusus Layanan Khusus) merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh

atas keberhasilan program BOP PKLK. Pengelolaan dana BOP PKLK yang baik akan membantu ketercapaian tujuan dari program tersebut.

Kota Tanjungpinang memiliki 3 Sekolah Luar Biasa yaitu SLB Negeri 1 Tanjungpinang, SLB Negeri 2 Tanjungpinang dan juga SLB Mutiara. Ketiga SLB tersebut sampai saat ini masih menerima dana BOP PKLK (Pendidikan Khusus Layanan Khusus) dari Pemerintah Pusat. Pada proses pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), SLB yang ada di Kota Tanjungpinang memiliki kendala yakni terjadinya keterlambatan dalam hal penyajian pelaporan pertanggungjawaban pada tahun 2018. Hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan pencairan dana bantuan dari pusat, yang mengakibatkan kosongnya kas pada awal tahun. Sementara ada program kegiatan ataupun perlengkapan yang dibutuhkan oleh sekolah yang dimana hal tersebut menggunakan biaya. Keterlambatan ini juga terkait saat penyajian laporannya, pada JUKLAK BOP PKLK seharusnya laporan pelaksanaan dilaporkan paling lambat Desember 2018 atau akhir tahun, tapi yang terdapat di SLB Tanjungpinang tidak sesuai dengan JUKLAK tersebut dan terjadi kelebihan dana ataupun dana yang belum terpakai pada saat batas waktu pelaporan pada tahun 2018, sedangkan kegiatan ataupun perlengkapan membutuhkan biaya. Serta kurangnya peran komite sekolah yang bertugas membantu melakukan pengawasan pelaksanaan dan pelaporan bantuan pemerintah PKLK (Pendidikan Khusus Layanan Khusus) untuk BOP PKLK Tahun tahun 2018. Komite sekolah seharusnya juga dapat berpartisipasi untuk mengawasi pengelolaan dana BOP melalui kotak saran pengaduan masyarakat yang ditujukan untuk membantu sekolah dalam pengawasan pelaksanaan dan

pelaporan bantuan pemerintah PKLK untuk BOP PKLK Tahun 2018. Melihat pentingnya Pengelolaan BOP PKLK dalam pelaksanaan pendidikan dan berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) menurut JUKLAK BOP PKLK Tahun 2018 Pada SLB Negeri 2 Tanjungpinang dan SLB Mutiara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di SLB Negeri 2 dan SLB Mutiara Tanjungpinang menurut JUKLAK BOP PKLK ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan sebagai berikut : Untuk menganalisis kesesuaian dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di SLB Tanjungpinang menurut JUKLAK PKLK Tahun 2018.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian terarah, terfokus, serta juga menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka peneliti perlu melakukan batasan masalah. Sekolah yang diteliti yaitu SLB di Tanjungpinang, Bantuan Operasional Sekolah yang diambil pada tahun 2018. Adapun yang akan peneliti batasi dalam penelitian ini ada beberapa

indikator penelitian seperti, Organisasi Pelaksana, Tugas dan Tanggung Jawab, Rencana Kegiatan, Pembelanjaan Dana, Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Ketentuan Perpajakan, Pelaporan, Pengawasan, Sanksi.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Hasil dari penelitian yang dilakukan, diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bahan pendidikan untuk menambah wawasan serta menerapkan pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang baik agar mendapatkan hasil yang efektif pada Sekolah Luar Biasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah sebagai gambaran kondisi yang bersangkutan dan bagi peneliti untuk kepentingan penelitian dan perbaikan pelaksanaan program dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun berikutnya serta peningkatan kualitas pengawasan pengelolaan dana BOP PKLK.

b. Bagi Peneliti

Memberikan acuan bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proses penyusunan penulisan hasil penelitian secara menyeluruh dan supaya mudah dipahami, maka disusun suatu sistematika penulisan yang terbagi atas lima bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini diuraikan mengenai latar belakang masalah dari penelitian yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan dalam pokok - pokok permasalahan, disampaikan tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan pada akhir bab ini disampaikan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua terdiri dari tinjauan pustaka yang terdiri dari teori-teori, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian dan penelitian terdahulu yang berguna sebagai acuan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai jenis penelitian yang dilakukan, jenis dan tingkat pengumpulan data yang dibutuhkan, definisi operasional variabel, teknis analisis data yang digunakan serta jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian serta hasil dari penelitian yang dilakukan dengan pengujian secara kualitatif.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran atas kesimpulan yang didapatkan dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

2.1.1.1 Pengertian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

BOP yakni Bantuan Operasional Pendidikan. Bantuan Operasional yang meliputi 9 komponen, ialah: registrasi siswa baru, penggandaan/ pengadaan buku bacaan, bahan ajar serta LKS, pemberian insentif guru, pengembangan profesi guru, pembiayaan perpustakaan serta administrasi sekolah, aktivitas ekstrakurikuler, pengadaan perlengkapan peraga serta bahan praktikum laboratorium, pembiayaan uji sekolah serta ulangan, dan perawatan ringan sekolah. (Juklak BOP PKLK, 2018)

BOP ialah program pemerintah yang pada dasarnya yakni untuk penyediaan pendanaan bayaran pembedahan nonpersonalia buat satuan pembelajaran dasar selaku pelaksana program harus belajar buat Kemendiknas(2010). Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yakni dorongan dari Pemerintah Dusat kepada sekolah- sekolah bersumber pada jumlah murid yang terdapat di sekolah tersebut. BOP yang diberikan kepada sekolah buat dikelola cocok dengan syarat yang diresmikan pemerintah pusat. Besarnya BOP digunakan dalam pembiayaan yang meliputi bayaran penyediaan fasilitas serta prasarana, pengembangan sumber tenaga manusia, serta modal kerja senantiasa.

Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yakni sesuatu program dorongan Pemerintah Wilayah buat meringankan beban orang tua terhadap pembelajaran anaknya. BOP ini diberikan ke sekolah- sekolah dari sekolah tingkatan dasar (SD serta SMP), tingkatan menengah (SMA/Sekolah Menengah Kejuruan (Sekolah Menengah Kejuruan (Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ataupun Sekolah Luar Biasa (SLB). Pemerintah Wilayah baik di tingkatan Propinsi ataupun Kabupaten/ Kota wajib senantiasa sediakan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) masing- masing tahun selaku sumber utama pembiayaan sekolah yang dianggarkan lewat APBD setempat. Buat Petunjuk Teknis Mengkonsumsi Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2015, ialah sesuatu program pemerintah yang pada dasarnya yakni buat penyediaan pendanaan bayaran pembedahan non personalia buat satuan pembelajaran dasar selaku pelaksanaan program harus belajar. Bantuan Operasional Pendidikan yakni program pemerintah yang berbentuk pemberian dana langsung kepada sekolah yang besarnya dihitung bersumber pada jumlah siswa pada tiap- masing- masing sekolah.

Untuk Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar bantuan operasi nonpersonalia yakni standar bayaran yang harus diperlukan buat membiayai kegiatan operasi nonpersonalia sejauh 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan biar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara tertib dan berkelanjutan yang mana telah diterapkan cocok Standar Nasional Pendidikan.

Jadi, dapat disimpulkan Bayaran Operasional Pendidikan(BOP) ialah dorongan dari Pemerintah Daerah buat meringankan beban orang tua terhadap anaknya. BOP diberikan kepada sekolah buat dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah pusat. Pemerintah Daerah baik di tingkatan Provinsi maupun Kabupaten/ Kota harus tetap sajikan Bayaran Operasional Pendidikan(BOP) masing- masing tahun sebagai sumber utama pembiayaan sekolah yang dianggarkan melalui APBD setempat.

2.1.1.2 Tujuan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

Ada pula tujuan dari BOP merupakan selaku berikut:

1. Untuk menolong sekolah buat menanggulangi bayaran operasional pembelajaran.
2. Untuk meringankan beban orang tua terhadap pembiayaan pembelajaran.
3. Untuk berikan motivasi untuk penyelenggara pembelajaran untuk anak berkebutuhan spesial.
4. Untuk mewujudkan keberpihakan pemerintah terhadap partisipan didik yang tidak sanggup buat memperoleh layanan pembelajaran yang terjangkau serta bermutu

Tujuan BOP ini biar bisa dijadikan pedoman biar pas serta benar .(*Juklak BOP PKLK, 2018*)

2.1.1.3 Pemberi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

Pemberi Bantuan Operasional Pendidikan adalah Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (*Juklak BOP PKLK*, 2018)

2.1.1.4 Persyaratan Calon Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon BOP adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Nomor Pokok Sekolah (NPSN);
2. Tercatat di system Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Memiliki izin operasional yang masih berlaku;
4. Ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan dengan surat keputusan Direktur Pembinaan PK-LK, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Persyaratan calon penerima ini harus sesuai dan dipenuhi dengan calon penerima BOP. (*Juklak BOP PKLK*, 2018)

2.1.1.5 Rincian Jumlah Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

Nilai Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang akan disalurkan kepada seluruh sasaran penerima bantuan melalui Pemerintah Pusat yang

bersumber dari dana APBN pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk murni.

Masing-masing sekolah akan menerima dana bantuan biaya tetap (*fixed cost*) sebagai berikut :

1. Kategori sekolah negeri

Jumlah BOP : biaya tetap + (jumlah siswa x biaya variabel)

Jumlah BOP : Rp. 10.000.000 + (jumlah siswa x Rp. 146.300)

2. Kategori sekolah swasta

Jumlah BOP : biaya tetap + (jumlah siswa x biaya variabel)

Jumlah BOP : Rp. 15.000.000 + (jumlah siswa x Rp. 146.300)

Semua rincian ini sudah ada dalam JUKLAK BOP.(*Juklak BOP PKLK*, 2018)

2.1.1.6 Tugas dan Tanggungjawaban Bantuan Operasional Pendidikan

1. Direktorat Pembinaan PKLK

- a. Untuk menyusun petunjuk pelaksanaan pemberian Bantuan Operasional Pendidikan;
- b. Untuk menyebarluaskan informasi tentang pemberian Bantuan Operasional Pendidikan;
- c. Untuk menerima usulan daftar nama sekolah dan daftar nama peserta didik calon penerima bantuan;
- d. Untuk melakukan validasi data usulan calon penerima bantuan yang diusulkan Dinas Pendidikan Provinsi;

- e. Untuk menerbitkan surat keputusan penetapan penerima Bantuan Operasional Pendidikan;
- f. Untuk melakukan bimbingan teknis dan penandatanganan surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Pendidikan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan kepala sekolah yang peserta didiknya memperoleh Bantuan Operasional Pendidikan;
- g. Untuk memproses penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan kepada sekolah yang telah ditetapkan memperoleh bantuan;
- h. Untuk menyampaikan rekapitulasi sekolah penerima Bantuan Operasional Pendidikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi;
- i. Untuk menerima laporan pertanggungjawaban pemberian Bantuan Operasional Pendidikan.

2. Dinas Pendidikan Provinsi

- a. Untuk mensosialisasikan informasi tentang Bantuan Operasional Pendidikan dari Direktorat Pembinaan PKLK ke sekolah;
- b. Untuk mengetahui/menyetujui surat perjanjian pemberian bantuan;
- c. Untuk melakukan pembinaan penggunaan Bantuan Operasional Pendidikan ke sekolah;
- d. Untuk memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Operasional Pendidikan;
- e. Untuk memfasilitasi penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan dari sekolah penerima bantuan pemerintah.

3. Sekolah Pelaksana

- a. Untuk menandatangani surat perjanjian pemberian dana bantuan dengan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Untuk menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak terhadap bantuan operasional pendidikan;
 - c. Untuk menggunakan dana bantuan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - d. Pihak penerima dapat menjadikan kemitraan yang baik dengan pihak-pihak yang berkompeten dan memberikan hasil yang optimal dan terarah;
 - e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen yang terkait dengan pemberian bantuan dan pelaksanaan kegiatan;
 - f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Pembinaan PK-LK;
 - g. Membuat laporan pelaksanaan penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
 - h. Menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan kepada Direktorat Pembinaan PKLK yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi
4. Komite Sekolah
- Membantu melakukan pengawasan pelaksanaan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Pendidikan.

2.1.2 Pengelolaan Dana

2.1.2.1 Pengertian Pengelolaan Dana

Pengelolaan Dana ialah totalitas aktivitas yang meliputi perencanaan, penerapan, penatausahaan pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan. Dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, murah, efisien transparan serta bertanggung jawab dengan mencermati azas keadilan, kepatuhan, serta khasiat buat warga. (V. W. Sujarweni, 2015)

Pengelolaan Dana merupakan kekuasaan selaku kepala pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bertabiat universal serta kewenangan yang bertabiat spesial. Pengelolaan anggaran pemasukan serta belanja Negeri buat menetapkan pedoman penerapan serta tanggungjawaban anggaran pemasukan serta belanja Negeri, pedoman penataan rencana kerja, dan penetapan pendapatan serta tunjangan (Arif, Muchlis, & Iskandar, 2010).

Pengelolaan dana yakni aspek berarti buat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN yang besar. Pengelolaan dana wajib didasarkan pada prinsip tahunan, akuntabilitas, serta transparansi (Mahmudi, 2011). Pengelolaan dana merupakan totalitas aktivitas yang meliputi perencanaan, penerapan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan buat menciptakan laporan selaku wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan (Mulyana, 2014). Pengelolaan dana ialah penyampaian laporan tanggungjawaban keuangan pemerintah yang penuh prinsip-prinsip pas waktu serta disusun dengan menjajaki Standar Akuntansi Pemerintah yang sudah diterima secara universal (Nordiawan, Putra, & Rahmawati, 2010)

Jadi, bisa disimpulkan pengelolaan dana merupakan sesuatu perencanaan, pengarahan, pemantauan, dan pengendalian dari suatu pemerintahan yang efektif serta efisien buat menggapai sesuatu tujuan. Suatu sistem mengelola sesuatu Anggaran yang sudah direncanakan serta dilaksanakan. Pengelolaan dana pemerintah yang wajib dipertanggungjawabkan atas dana yang sudah diterima serta penyaluran dana tersebut dan menciptakan suatu laporan pertanggungjawaban diakhir periode/ tahun.

2.1.3 Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan yakni sesuatu posisi keuangan berarti yang berasal dari transaksi- transaksi yang dicoba oleh organisasi sector public. Laporan keuangan ini buat menghasilkan akuntabilitas sector public. Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik ini bisa digunakan buat membagikan data tentang keuangan dari sesuatu entitas yang bermanfaat untuk beberapa besar pemakai dalam membuat serta mengevaluasi keputusan menimpa alokasi sumber energi yang diperlukan oleh sesuatu entitas dalam aktivitasnya buat menggapai sesuatu tujuan (V. W. Sujarweni, 2015).

Laporan keuangan ialah sesuatu perlengkapan data yang buat menghubungkan pihak satu dengan pihak- pihak berarti, yang berstruktur buat menimpa posisi keuangan serta transaksi- transaksi yang dicoba sesuatu entitas laporan (Hery, 2009). Laporan keuangan yakni laporan yang harus serta di informasikan oleh tiap tingkatan Pengguna Anggaran, pengelola perbendaharaan,

dan pemerintah pusat/ wilayah. Tidak hanya itu, diatur pula syarat aktivitas akuntansi mulai dari tingkatan satuan kerja fitur wilayah hingga tersusunnya laporan keuangan (Darise, 2008)

Laporan keuangan ialah laporan yang disusun buat sediakan data keuangan yang untuk relavan para pengguna laporan keuangan. Data keuangan uraian yang dibutuhkan serta segala transaksi yang dicoba oleh sesuatu entitas pelaporan sepanjang satu periode pelaporan. Digunakan selaku bagian pertanggungjawaban, laporan keuangan tersebut bisa digunakan buat mengevaluasi daya guna serta efisiensi sesuatu entitas pelaporan (Arif, Muchlis, & Iskandar, 2009).

Laporan keuangan merupakan wujud tanggungjawaban manajemen kepada pihak internal (*internal accountability*), ialah kepada pihak- pihak yang ada di dalam organisasi, misalnya atasan, pegawai, serta pemeriksa ataupun pertanggungjawaban eksternal (*external accountability*) kepada pihak- pihak luar yang berkepentingan, misalnya warga, investor, kreditor, lembaga donor, pers, dan pihak- pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut buat dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial serta politik (Mahmudi, 2011)

Jadi, bisa disimpulkan laporan keuangan merupakan suatu wujud pertanggungjawaban yang disusun jadi suatu laporan buat memberi tahu transaksi- transaksi keuangan, seberapa besar yang sudah di gunakan, serta pengelolaan keuangan yang bertabiat akuntabilitas serta transparan dan harus dilaporkan buat mengenali data keuangan yang terdapat didalam suatu industri maupun di area pemerintahan.

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Berikut adalah tujuan dan fungsi laporan keuangan Menurut (V.W. Sujarweni, 2015).

Berikut merupakan tujuan serta guna laporan keuangan Bagi (V. W. Sujarweni, 2015)

1. Kepatuhan serta pengelolaan

Laporan keuangan yang bisa membagikan jaminan untuk pengguna laporan keuangan dari pihak otoritas penguasa kalau pengelolaan sumber energi sudah dicoba cocok dengan syarat hukum serta peraturan lain yang sudah diresmikan.

2. Akuntabilitas serta Pelaporan Retrospektif

Laporan keuangan digunakan selaku wujud pertanggungjawaban kepada publik.

3. Perencanaan serta Data Otorisasi

Laporan keuangan membagikan dasar perencanaan kebijakan serta kegiatan di masa yang hendak tiba serta membagikan informasi-informasi pendukung menimpa otorisasi pemakaian dana.

4. Kelangsungan organisasi

Laporan keuangan digunakan buat menolong pembaca dalam memastikan kalau unit kerja bisa meneruskan dalam menyediakan benda serta jasa (pelayanan) di masa yang hendak datang.

5. Ikatan masyarakat

Laporan keuangan bisa berikan peluang kepada organisasi buat menga-

jukan *statement* atas prestasi yang sudah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, serta warga. Pula berperan selaku perlengkapan komunikasi dengan public serta pihak- pihak lain yang berkepentingan.

6. Buat membagikan data yang sudah digunakan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut ekonomi, sosial, serta politik dan selaku fakta pertanggungjawaban serta pengelolaan organisasi pemerintahan.
7. Buat berikan data yang hendak digunakan buat mengevaluasi kinerja manajerial serta organisasional.
8. Dan membagikan data yang hendak digunakan buat mengevaluasi kinerja manajerial serta organisasional.

2. 1. 3. 3 Tipe– Tipe Laporan Keuangan

Adapun jenis- jenis laporan keuangan yang lengkap bagi (Halim & Kusufi, 2012):

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran ialah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, serta pemakaian sumber energi ekonomi yang dikelola oleh pemerintah ataupun wilayah dalam satu periode pelaporan. LRA mengatakan aktivitas keuangan pemerintah pusat ataupun wilayah yang menampilkan ketaatan terhadap APBN/ APBD, LRA sekurang- kurangnya ialah:

- a. Pemasukan LRA;
- b. Belanja;
- c. Transfer;

- d. Surplus/ deficit- LRA;
- e. Pembiayaan;
- f. Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.

2. Laporan Pergantian Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Pergantian Saldo Anggaran Lebih ialah salah satu laporan yang tadinya tidak terdapat dalam laporan keuangan pokok pemerintah bagi PP No 24 Tahun 2005. Itu maksudnya Laporan Pergantian Saldo Anggaran Lebih baru terdapat serta harus disajikan oleh entitas pemerintah pusat serta entitas pelaporan yang lain yang menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasian.

3. Neraca

Neraca sesuatu yang menggambarkan posisi keuangan sesuatu entitas pelaporan menimpa asset, kewajiban, serta ekuitas pada bertepatan pada tertentu.

Unsur- unsur yang ada dalam neraca meliputi:

- a. Asset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas

4. Laporan arus kas disajikan oleh unit yang memiliki guna perbendaharaan universal. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan data menimpa sumber, pemakaian, pergantian kas serta dan kas sepanjang satu periode akuntansi, serta saldo kas pada bertepatan pada pelaporan.

5. Laporan Operasional Catatan atas laporan keuangan, ialah suatu data ataupun catatan bonus yang ditambahkan buat berikan uraian kepada pembaca atas laporan keuangan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Konsep yang dikembangkan untuk penelitian, 2020

2.3 Penelitian Terdahulu

- a. (Andreyan et al., 2014) “ Daya guna Pengelolaan Dana Dorongan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada”
Studi ini bertujuan buat mengidentifikasi (1) Pengelolaan dana Dorongan Operasional Sekolah (BOS) pada seluruh sekolah dasar, (2) Tingkatan energi guna pengelolaan dana BOS, (3) kasus yang dirasakan dalam pengelolaan dana BOS pada seluruh sekolah dasar, (4) Upaya mengatasi kasus dana BOS. Studi ini dilaksanakan pada sekolah dasar yang ada di

Kecamatan Sukasada. Data dikumpulkan dengan tata metode wawancara, kuesioner dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil studi menunjukkan jika (1) pengelolaan dana BOS pada seluruh sekolah dasar sudah sesuai dengan Permendiknas No. 76 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dana BOS Tahun 2013, (2) tingkatan energi guna pengelolaan dana BOS pada seluruh sekolah dasar mencapai 87%, terletak dalam kriteria sangat efektif, (3) kasus yang dirasakan seluruh sekolah dasar yakni dana BOS datang tidak cocok waktu, dan komite kurang memahami pengelolaan dana BOS, (4) upaya yang dicoba seluruh sekolah dasar yakni melakukan pinjaman dana serta berbelanja secara kredit, dan melakukan penguatan pada komite terpaut dana BOS.

- b. (Mussardo, 2019) "Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Dorongan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara" Tujuan studi ini ialah buat mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan: 1. Implementasi kebijakan pemberian dana Dorongan Operasional Pendidikan (BOP) dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Lambay Kabupaten Kolaka Utara 2. Faktor-aspek yang menghalangi implementasi kebijakan pemberian dana Dorongan Operasional Pendidikan (BOP) dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara.

- c. (Akbar, 2016)“ Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Dorongan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara)” Dari studi ini menunjukkan jika hasil evaluasi terhadap program pemberian dana dorongan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di Kabupaten Mamuju Utara menghasilkan jika ada kriteria-kriteria evaluasi yang sudah tercapai tetapi ada pula yang menunjukkan belum tercapai. Namun sebagian besar dari hasil studi yang telah dicoba menunjukkan jika kriteria evaluasi dari masing- masing indikator sudah tercapai, Mengenai ini menampilkan jika evaluasi terhadap program pemberian dana dorongan operasional sekolah memperlihatkan hasil yang cukup baik sangat tidak buat disaat ini. Walaupun begitu, masih banyak catatan berarti yang harus diselesaikan demi keberlanjutan program dana BOS khususnya di Kabupaten Mamuju Utara, karena bukan tidak dapat jadi sebagian Mengenai yang sehabis itu belum maksimal dalam jalannya program dana BOS tersebut malah hendak jadi kasus besar ke depannya.
- d. (Winarsih & Karsiati, 2019)“ Pengelolaan Dorongan Operasional Pendidikan (BOP) Pada Kelompok Bermain Riang Kota Semarang. Studi ini bertujuan buat mengidentifikasi penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dorongan operasional pendidikan (BOP) pada kelompok bermain Riang Kota Semarang dan hambatan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dorongan operasional pendidikan (BOP) pada kelompok bermain Riang Kota Semarang. Hasil studi meyakinkan jika Sistem Informasi Akuntansi sangat diperlukan oleh sesuatu industri

maupun lembaga pendidikan. Terlihat dari pembahasan sistem informasi akuntansi sudah dicoba maupun diterapkan di sebagian lembaga pendidikan, sangat utama dalam sistem kas masuk dan kas keluar. Sistem informasi akuntansi yang sudah berjalan baik di lembaga pendidikan, hendak sangat membantu lembaga pendidikan tersebut buat menjauhi kecurangan selisih antara kas masuk dengan kas keluar dan tidak terjalin aksi- aksi penyelewengan yang dapat merugikan lembaga pendidikan.

- e. (Rap, 2017) "Performing Accountability: Unanticipated Responses to Administrative Reform" Hasil riset ini Di jantung reformasi Manajemen Publik Baru (NPM) terletak suatu teori akuntabilitas buat hasil. Dalam 3 dekade terakhir, ilham normatif ini ditransfer dari" jantung Anglo-Amerika" dari reformasi semacam itu ke banyak bagian lain dunia. Lewat etnografi organisasi dari asosiasi pengguna air Meksiko, postingan tersebut menampilkan kalau, walaupun terdapat reformasi, organisasi semacam itu bisa beroperasi selaku tubuh yang sebagian besar tidak responsif serta tidak transparan untuk para pengguna serta otoritas pengatur. Manajemen kebalikannya membalikkan akuntabilitas serta alihkan kesalahan ke dasar. Sebab budaya membentuk reformasi dari dalam, reformasi tidak dan merta mengganti serta mendepolitisasi aplikasi manajerial sebagaimana diartikan, namun memanglah mempunyai implikasi konkret buat aplikasi serta dampak pengaturan akuntabilitas. Postingan tersebut berkomentar kalau manajemen melaksanakan pertanggungjawaban secara budaya, serta ini berperan buat sikap

manajerial yang legal secara moral yang tidak bertanggung jawab atas hasil serta menciptakan kinerja keuangan serta organisasi yang kurang maksimal. Riset permasalahan berkontribusi pada perspektif interpretatif yang berlaku buat bermacam reformasi administrasi yang mempromosikan akuntabilitas dalam pengaturan budaya serta politik yang berbeda. Riset ini menuju pada saran khusus buat menanggulangi hasil kontraproduktif dari reformasi NPM dalam pengelolaan irigasi Meksiko.

- f. (Kharisma, 2018) “Can A School Operational Assistance Fund Program (BOS) Reduce School Drop- Outs During The Post- Rising Fuel Prices In Indonesia? Evidence From Indonesia” Riset ini bertujuan buat menganalisis akibat program dana dorongan operasional sekolah (program BOS) terhadap tingkatan putus sekolah sepanjang peningkatan harga bahan bakar dengan memakai pendekatan perbandingan dalam perbandingan. Program BOS merupakan pengembangan lebih lanjut dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS) pembelajaran pemerintah pada periode 1998- 2003 serta pengurangan program kompensasi subsidi bahan bakar yang dilaksanakan sepanjang 2003- 2005. Hasil riset menampilkan kalau akibat BOS pada tingkatan putus sekolah siswa berumur 7- 15 tahun sepanjang periode yang diselidiki dalam riset ini lebih rendah daripada mereka yang tidak menerima dana BOS, namun secara statistik tidak signifikan. Sedangkan itu, bila akun riset dibatasi pada pengaruh siswa berumur 16-20 tahun yang tadinya menerima khasiat BOS, itu menampilkan kalau program BOS mempunyai pengaruh positif terhadap

angka putus sekolah. Tetapi, kanak-kanak berumur 16-20 tahun yang tadinya tidak menerima khasiat BOS berakibat negatif pada angka putus sekolah. Bersumber pada kenyataan ini, khasiat BOS sehabis peningkatan harga bahan bakar di Indonesia sepanjang periode riset tampaknya tidak sangat efisien dalam merendahkan angka putus sekolah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada riset ini penulis memakai tata cara riset kualitatif. Yang dimana riset kualitatif merupakan sesuatu tipe riset yang hasil temuannya tidak didapatkan bersumber pada prosedur statistik ataupun wujud hitungan yang lain.

Penelitian kualitatif merupakan riset yang bermaksud buat menguasai fenomena tentang apa yang dirasakan oleh subjek riset. Tata cara Kualitatif bertujuan buat menguraikan informasi riset memakai kalimat yang bersumber dari hasil wawancara bersumber pada sebagian faktor dari suatu riset yang didiskusikan sehingga data tersebut bisa menolong hasil riset serta bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, tercantum dalam rangka pengambilan kesimpulan serta pemberian saran. (Moleong, 2011)

3. 2 Jenis Data

Pada riset ini tipe informasi yang digunakan merupakan informasi primer serta pula informasi sekunder. Bagi (Sugiyono, 2017) bila dilihat dari sumbernya hingga informasi dibagi jadi 2 ialah informasi primer serta informasi sekunder.

3. 2. 1 Data Primer

Data Primer ialah informasi yang diperoleh serta didapatkan secara langsung dari objek riset. Data primer pada riset ini merupakan informasi kualitatif yang diperoleh dengan melaksanakan wawancara langsung yang dicoba

oleh periset kepada pihak sekolah yang terdapat di SLB Kota Tanjungpinang serta pula observasi.

3. 2. 2 Data Sekunder

Data Sekunder yakni informasi yang didapatkan secara tidak langsung ataupun melalui perantara, misalnya catatan ataupun dokumentasi industri semacam pendapatan, laporan pemerintah, absensi, laporan keuangan publikasi industri, serta lainnya. Data sekunder dalam periset ini merupakan berbentuk informasi tentang jumlah pegawai, struktur organisasi, cerminan kondisi sekolah, catatan– catatan ataupun dokumen yang dibutuhkan, dan Laporan Dorongan Operasional Pembelajaran.

3. 3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan suatu informasi riset, peneliti mengumpulkan informasi dengan sebagian tata cara (Sugiyono, 2017), seperti:

- a. Wawancara, ialah proses pengumpulan informasi lewat tanya jawab langsung dengan informan buat memperoleh data– data bonus yang berkaitan dengan riset ini.
- b. Observasi, ialah proses pengumpulan informasi dengan metode mengamati secara langsung aktivitas yang dicoba objek tersebut. Perihal ini bertujuan buat mendapatkan informasi serta data secara langsung dari pihak yang dikira berkompeten di wilayah objek riset tersebut, terpaut dengan kebijakan pemerintah wilayah setempat terhadap komitmen buat tingkatkan layanan pembelajaran.

c. Dokumentasi, ialah berbentuk catatan kejadian yang telah lalu. Dokumen yang berupa guratan pena contohnya catatan setiap hari, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berupa foto contohnya gambar, foto hidup, sketsa, serta lain– lain. Dokumentasi merupakan indera aksesoris yang mampu dipakai pada pemakaian tata cara observasi serta wawancara dalam riset kualitatif.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator
1.	Organisasi, Tugas, dan Tanggungjawab	1. Organisasi Pelaksana 2. Tugas dan Tanggung Jawab 3. Rencana Kegiatan 4. Pembelanjaan Dana 5. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana 6. Ketentuan Perpajakan 7. Pelaporan 8. Pengawasan 9. Sanksi

3.5 Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan Data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif mengikuti konsep Miles dan Huberman, (Sugiyono, 2016) Aktivitas pada analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sebagai akibatnya datanya telah jenuh. Adapun tahapan proses data pada penelitian ini dilakukan pada 3 termin diantaranya menjadi berikut :

1. *Data Reduction (Reduksi Data)*

Data yang diperoleh berdasarkan lapangan jumlahnya relatif banyak, buat itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti sudah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka semakin banyak jumlah data yang didapat, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan data melalui reduksi data. Mereduksi data merupakan merangkum, menentukan hal – hal yang pokok, memfokuskan dalam suatu hal yang penting, dicari tema dan polanya dan pula membuang bagian yang tidak perlu. Dengan begitu data yang sudah direduksi akan menaruh citra yg lebih jelas, dan mempermudah buat peneliti pada melakukan pengumpulan data dalam termin berikutnya, dan mencarinya jika diperlukan. Mereduksi data bisa dilakukan menggunakan memakai alat-alat bantu elektronika misalnya personal komputer mini, menggunakan menaruh kode dalam aspek – aspek tertentu.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh penulis dilapangan melalui observasi, wawancara direkam dan dokumentasi yang jumlahnya cukup banyak. Penulis menulis dan menyusun dengan rinci, kemudian merangkumnya, dilanjutkan dengan memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal–hal yang berkaitan dengan penulis teliti.

2. *Data Display (Penyajian Data)*

Dalam penelitian kualitatif, pada saat melakukan proses penyajian data bisa dilakukan pada beberapa bentuk uraian singkat, bagan, interaksi antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (Sugiyono, 2016) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data*

in the past has been narrative text". Yang paling tak jarang dipakai buat menyajikan data pada penelitian kualitatif merupakan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah buat tahu apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya dari menggunakan apa yang sudah dipahami tersebut. "*looking at displays help us to understand what is happening and to do some thing-further analysis or caution on that understanding*" Miles and Huberman (1984). Selanjutnya disarankan, pada melakukan display data, selain menggunakan teks yang naratif, juga bisa berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

3. Conclusion/Verification (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan pada sebuah penelitian kualitatif mungkin akan bisa menjawab rumusan kasus yang sudah dirumuskan dalam awal penelitian, namun mungkin juga tidak, karena misalnya sudah dikemukakan bahwa kasus dan rumusan kasus dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang selesainya peneliti berada pada lapangan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis dalam bentuk pernyataan serta uraian dari data penelitian yang berbentuk angka yang akan disusun secara sistematis dengan membandingkan peraturan Permendikbud No 4 Tahun 2017 dengan realita pada SLB Tanjungpinang. Adapun yang dibandingkan menurut JUKLAK yaitu organisasi pelaksanaan, tugas dan tanggungjawaban, mekanisme proses bantuan,

bimbingan teknis penyaluran bantuan, rencana kegiatan, rincian anggaran belanja, pertanggung jawaban penggunaan dana, ketentuan perpajakan, pelaporan, pengawasan.

Tabel 3.2
Tabel Kesesuaian Petunjuk Teknis

No	Petunjuk Pelaksanaan	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Organisasi Pelaksanaan		
2	Tugas dan Tanggungjawaban		
3	Rencana Kegiatan		
4	Pembelanjaan Dana		
5	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana		
6	Ketentuan Perpajakan		
7	Pelaporan		
8	Pengawasan		
9	Sanksi		

Sumber : Petunjuk Teknis BOP PKLK Tahun 2018

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan operasional sekolah. *Jurnal Analisis Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 47–64.
- Andreyan, G., Bhawa, S., Haris, I. A., Artana, M., Ekonomi, J. P., & Ekonomi, F. (2014). Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 4(76), 11. <https://doi.org/10.1021/np800528a>
- Arif, B., Muchlis, & Iskandar. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: PT Indeks.
- Arif, B., Muchlis, & Iskandar. (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: PT Indeks.
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hery. (2009). *Akuntansi Keuangan Menengah I*. Jakarta: PT Bumi Akasara.
- Juklak BOP PKLK*. (2018).
- Kharisma, B. (2018). Can a School Operational Assistance Fund Program (BOS) Reduce School Drop-Outs During The Post-Rising Fuel Prices In Indonesia? Evidence From Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 19(1), 12. <https://doi.org/10.23917/jep.v18i2.4942>
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya.

Mulyana, B. (2014). *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Tangerang Selatan: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Mussardo, G. (2019). 濟無No Title No Title. *Statistical Field Theor*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Nordiawan, D., Putra, iswahyudi S., & Rahmawati, M. (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. (2013). Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Pasal 2. (1991). Pendidikan Luar Biasa.

Rap, E. (2017). Performing accountability: Unanticipated responses to administrative reform. *Human Organization*, 76(4), 358–369. <https://doi.org/10.17730/0018-7259.76.4.358>

Siswoyo, D. (2012). *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: FIP UPI.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Manajemen*. (Setiyawami, Ed.) (5th ed.). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Undang - Undang Nomor 20 pasal 5 ayat 2. (2003). Sistem Pendidikan Nasional.

Winarsih, H., & Karsiati. (2019). Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan

(BOP) Pada Kelompok Bermain Ceria Kota Semarang, 8.

CURRICULUM VITAE



Nama : Wan Ulfa Agustina

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjungbalai Karimun, 02 Agustus 1997

Status Marital : Belum Menikah

Alamat : Jl. Ganet Perum.Bintan Permai Block F3 No.4

Pekerjaan : Mahasiswi

Email : wanulfaagustina@gmail.com

Nama Orangtua : a. Ayah : Wan Suhermansyah
b. Ibu : Dewi Widiastuty

Riwayat Pendidikan :

- a. SD Negeri 011 Tanjungpinang Timur
- b. SMP Negeri 7 Tanjungpinang
- c. SMA Negeri 4 Tanjungpinang
- d. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang